

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KONTRIBUSI DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016-2019**



**CITTRAH TANDIRERUNG**

**1710321120**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
2021**

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS KONTRIBUSI DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016-2019**



Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana  
pada Program Studi S1 Akuntansi

**CITTRAH TANDIRERUNG**  
**1710321120**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL**  
**UNIVERSITAS FAJAR**  
**2021**

**SKRIPSI**

**ANALISIS KONTRIBUSI DAN PENINGKATAN POTENSI  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI  
SELATAN TAHUN 2016-2019.**

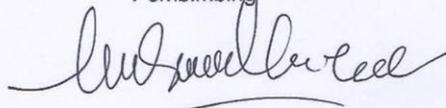
Disusun dan diajukan oleh

**CITRAH TANDIRERUNG**  
**1710321120**

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 6 September 2021

Pembimbing



**Muhammad Cahyadi, SE, M.Si, AAAIJ, QIP**  
**NIDN: 0911077502**

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial



**Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA**  
**NIDN: 0925107801**

## SKRIPSI

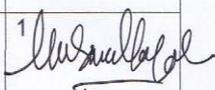
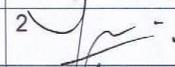
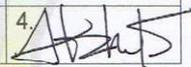
### ANALISIS KONTRIBUSI DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016-2019

disusun dan diajukan oleh

**CITTRAH TANDIRERUNG**  
1710321120

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **6 September 2021** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muhammad Cahyadi, SE, M.Si, AAAIJ, QIP NIDN: 0911077502	Ketua	1. 
2.	Yulia Yunita Yusuf, S.ST., SE., M.S.A NIDN: 0920088903	Sekretaris	2. 
3.	Teri, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., CPA., CHRO NIDN: 0930068001	Anggota	3. 
4.	Andi Abdul Azis Ishak, S.E., M.Com., Ak NIDN: 0006097102	Eksternal	4. 

Dekan Fakultas Ekonomi  
dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom  
NIDN: 0925096902  
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial  
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA  
NIDN. 0925107801

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Citrah Tandirerung

NIM : 1710321120

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Kontribusi dan Peningkatan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2019** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 6 September 2021

Yang membuat pernyataan,



Citrah Tandirerung

## PRAKATA

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan izinya penulis bisa menyelesaikan Proposal Skripsi ini, sehingga proposal skripsi yang berjudul **“Analisis Kontribusi dan peningkatan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan”** Proposal Skripsi adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar

Banyak pihak yang telah terlibat dalam membantu pembuatan proposal skripsi ini, yang pertama penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu penulis, bapak dan ibu yang telah memberikan dukungan moril dan doa sehingga penulis bisa sampai di tahap ini, tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Teri S.E., M.Si., Ak, Ca., CTA, CPA selaku dosen penasehat akademik penulis dan Bapak Muhammad Cahyadi, SE, M.Si, AAIJ,QIP Selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran semata mata untuk keberhasilan proposal skripsi yang dibuat penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Dr. Yusmanizar S.Ikom., M.Ikom selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Ibu Yasmi S.E., M.Si., Ak, Ca., CTA., ACPA selaku ketua Program Studi Akuntansi S1.

4. Bapak Teri S.E., M.Si., Ak, Ca., CTA, CPA selaku dosen penasehat akademik penulis.
5. Bapak ibu dosen Program Studi S1 Akuntansi yang telah banyak memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam pembuatan proposal skripsi.
6. Sahabat-sahabat penulis Jumraeni, Lisa, Andi rida, Dewi andini, dan M.As'ad Nur yang telah membantu penulis dalam pembuatan proposal skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan penulis angkatan 2017 S1 Akuntansi Universitas Fajar.

Sebagai manusia biasa tentu penulis masih mempunyai banyak kesalahan dalam pembuatan proposal skripsi ini, olehnya itu penulis berharap bisa menerima saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar proposal skripsi ini bisa lebih baik lagi hingga pada pembuatan skripsi.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 28 juli 2021

Cittrah Tandirerung

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KONTRIBUSI DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016-2019**

**Citra Tandirerung**

**Muhammad Cahyadi**

Penelitian ini berjudul “Analisis Kontribusi Dan Peningkatan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan”, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan potensi yang dimiliki pajak kendaraan bermotor di provinsi Sulawesi selatan dengan menggunakan metode analisis kontribusi yang didalamnya termasuk juga potensi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengolah data yang ada yang dibantu dengan alat analisis, diantaranya perhitungan potensi dan kontribusi. Hasil perhitungan tersebut akan dijelaskan ke dalam bentuk uraian dan dibantu dengan grafik dan tabel untuk mempermudah dalam mendeskripsikan hasil penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kontribusi Dan Peningkatan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2019 cukup besar jauh dari target yang ditetapkan. namun masih membutuhkan pengoptimalan pajak dari Bapenda Sulawesi Selatan agar perkiraan penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dapat tercapai.

**Kata Kunci** : PAD, Kontribusi PKB, Potensi PKB

# **ABSTRACT**

## **ANALYSIS OF CONTRIBUTION AND POTENTIAL INCREASE OF MOTOR VEHICLE TAX ON REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) IN SOUTH SULAWESI PROVINCE 2016-2019**

**Citra Tandirerung  
Muhammad Cahyadi**

*This research is entitled "Analysis of Contributions and Potential Increases of Motor Vehicle Taxes on Increasing Regional Original Income (PAD) of South Sulawesi Province", which aims to find out how much contribution and potential motor vehicle taxes have in South Sulawesi province by using the contribution analysis method which includes: including potential.*

*The method used in this study is a descriptive method using a quantitative approach. Data collection techniques used field research by means of interviews and documentation. Data analysis techniques were carried out by processing existing data assisted by analytical tools, including potential and contribution calculations. The results of these calculations will be explained in the form of descriptions and assisted with graphs and tables to make it easier to describe the results of the study.*

*The results of the study show that the contribution and potential increase of motor vehicle tax to the increase in the regional original income of South Sulawesi Province in 2016-2019 is quite large, far from the target set. but still requires tax optimization from the South Sulawesi Bapenda so that the estimated motor vehicle tax revenue (PKB) can be achieved.*

*Keywords: PAD, PKB Contribution, PKB Potential*

## DAFTAR ISI

Daftar isi	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAN KEASLIAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Praktis .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Pendapatan Asli Daerah .....	6
2.2.1 Teori Pemungutan Pajak .....	7
2.2.2 Fungsi Pajak Daerah ... ..	8
2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	9
2.2.4 Jenis Pajak .....	10
2.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	11
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor .....	12
2.3.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	13

2.3 Kontribusi .....	15
2.4 Potensi .....	16
2.5 Pertumbuhan .....	17
2.6 Penelitian Terdahulu.....	17
2.7 Kerangka Pemikiran.....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Rancangan Penelitian.....	22
3.2 Tempat dan waktu penelitian.....	22
3.3 Sumber Data.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data... ..	23
3.5 Analisis Data.....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Instansi.....	26
4.1.1 Visi dan Misi Perusahaan.....	28
4.1.2 Struktur Organisasi.....	29
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.....	30
4.2.1 Sebaran Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.....	30
4.2.2 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan .....	32
4.2.3 Potensi Peningkatan dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan.....	35
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran.....	40
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	40

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>41</b>
----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2016–2029.....	3
Tabel.2.2.4 macam-macam pajak daerah.....	10
Tabel 2.6 Penelitian terdahulu.....	17
Tabel 1 Jumlah Sepeda motor.....	30
Tabel 2 Realisasi PKB Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2016-2019.....	33
Tabel 3 Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan menurut BPS 2016 dan hasil prediksi.....	35
Tabel 4 Jumlah kendaraan yang membayar pajak dan jumlah kendaraan menurut BPS, periode 2016-2019.....	36
Tabel 5 Rata-rata nilai PKB (Rp/unit kendaraan) periode 2016-2019.....	36
Tabel 6 Prediksi PKB tidak terbayar per tahunnya selama periode 2016-2019 .....	37
Tabel 7 Tingkat efektifitas penarikan PKB periode 2016-2019.....	37

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.7 Kerangka pikir penelitian.....	30
Gambar 4.4.3 Struktur Organisasi.....	31
Gambar 2 Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2016-2019.....	32
Gambar 3 sebaran kendaraan bermotor yang ada setiap kabupaten/kota.....	33
Gambar 4 Hubungan antara PAD dan PKB Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2019.....	34
Gambar 5 Tren pertumbuhan PAD dan PKB Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2019.....	35
Gambar 6 Rata-rata kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2019.....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pertanyaan.....	43
2. Dokumentasi lapangan.....	42
3. Data Realisasi Pendapatan yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019.....	48
4. Data kendaraan bermotor.....	49
5. Rata-rata Pertumbuhan KB.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan daerah ialah komponen integral dari cara pembangunan nasional yang menurut hakekatnya menggambarkan cara terencana untuk mengembangkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga terwujud sebuah kekuatan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Lain dari itu pembangunan daerah juga menggambarkan bagian mengenai kesanggupan mengendalikan asal usul ekonomi daerah bertujuan untuk menyerahkan iuran dalam rangka penerimaan yang asalnya dari suatu daerah dimana membayar kebutuhan pemerintah serta pembangunan untuk kemakmuran.

Bapenda Sulawesi Selatan (2014-2018) Pendapatan daerah merupakan keseluruhan dari pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah yang berguna dalam melakukan pembiayaan guna mencapai target dari pemerintah daerah dan pendapatan lainnya dari daerah yang real serta dalam pendanaan melewati pemerintah pusat yang dapat dikatakan dana transfer, akan dilakukan menggunakan asas demokratis, kesetaraan keadilan, peran masyarakat, dan pertanggungjawaban atas potensi yang dimiliki suatu daerah.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah "Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pendapatan yang didapat daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan" (Herjanti, 2020:15)

Menurut Piterdono (2016: 1) Kendaraan bermotor dimasukan ke dalam jenis kendaraan, beserta gandengan yang dipakai di berbagai jalan raya serta bergerak di peralatan teknik, dimana motor dan peralatan lain berguna dalam pengubahan sebuah sumber daya energi khusus menjadi energi, diantaranya peralatan berat,besar yang dapat bergerak didalamnya termasuk dalam pengertian kendaraan.

Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) didapatkan dari Pajak Daerah, Retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pajak Daerah ialah satu dari sumber penerimaan daerah yang terutang bagi pribadi atau badan yang mempunyai sifat memaksa sesuai undang-undang dengan tidak menerima balasan secara langsung dan dipakai guna kepentingan daerah yang sebesar-besarnya berdasar undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pajak daerah tersusun tentang pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak Provinsi terbagi atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Air Permukaan
4. Pajak Reklame

Penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2019) Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan juga Kontribusinya terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016 didapatkan hasil penelitian membuktikan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) menghadapi perkembangan yang cenderung positif pada tahun 2010

hingga 2014 namun beberapa tahun tertentu menanggung penurunan. Rasio efektivitas 100% keatas menggambarkan kinerja pemungutan pajak yang sudah sangat efektif. Penerimaan pajak tersebut untuk disalurkan bagi kabupaten/kota yang berkaitan sebagai pajak bagi hasil. Namun pajak bagi hasil belum sanggup berkontribusi dengan cara maksimal pada pertumbuhan pendapatan daerah di Kabupaten Sleman.

Adapun fenomena yang diungkapkan peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor  
Tahun 2016 - 2020

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2016	1.006.097.880.000	1.026.994.110.000	102,08%
2	2017	1.106.098.000.000	1.103.139.260.000	99,73%
3	2018	1.195.598.000.000	1.242.314.483.837	103,91%
4	2019	1.345.247.950.000	1.394.198.331.701	103,64%
5	2020	1.263.000.000.000	1.238.000.000.000	98,07%

Sumber:(*Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah 2016-2020. Badan  
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan*)

Tabel diatas adalah target dan realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 2016 hingga 2020, pada data diatas menunjukkan tahun 2016 realisasi sudah melampaui target dengan persentase 102,08% sedangkan pada tahun 2019 belum mencapai target yakni 99,73% meskipun belum mencapai target namun persentase yang dicapai sudah mendekati target . Tahun 2018 dan tahun 2019 keduanya sudah melebihi 100% yang artinya persentase tersebut sudah melampaui target. Memasuki tahun 2020 terjadi penurunan dengan capain target

98,07% target pada tahun 2020 juga sudah diturunkan namun belum bisa mencapai target.

Pada pasal 2 UU NO. 28 tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah, bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 4 jenis pajak yang telah di muat diatas, peneliti memilih pajak kendaraan bermotor yang menjadi bahan penelitian dikarenakan PKB ialah salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapat daerah. Hal itu dikarenakan pertumbuhan jumlah kendaraan yang diperoleh dari daerah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Beberapa faktor yang mendorong jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya antara lain kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi yang sekarang yang telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor sangatlah mudah.

Pada tahun 2020 pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan mengenai pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Hal itu tercatat dalam (Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 884 / III / TAHUN 2020) tentang “Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 Di Provinsi Sulawesi Selatan” hal tersebut tentunya bisa mempengaruhi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor, namun hal tersebut belum bisa diakses datanya pada tahun 2020.

Fenomena diatas terjadi selama kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan dan penurunan capaian target pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dasar peneliti untuk mengangkat judul: ***“Analisis Kontribusi Dan Peningkatan Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli***

**Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan** “Karena itu perlu adanya usaha yang dikerjakan untuk memberi rasa sadar kepada masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor selaku wajib pajak agar menunaikan kewajiban membayar pajak sebab pajak kendaraan bermotor menjadi sumber dominan akan pemasukan dana secara optimal ke kas daerah yang selanjutnya dipakai untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah agar dapat mengembangkan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak meningkatkan sistem jaminan *social*.”

## **1.2 Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berapa kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara umum memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016- 2019?
2. Berapa besar potensi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas maka Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016-2019 secara umum.

2. Untuk mengetahui berapa besar potensi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019

#### **1.4 Kegunaan Praktis**

1. Manfaat teoritis dan akademis, diharapkan dijadikan sebagai bahan acuan serta dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai judul yang diteliti.
2. Manfaat praktik, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja instansi untuk kedepanya dan memberikan gambaran tentang pentingnya *kontribusi pajak kendaraan terhadap pendapatan asli daerah*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Bapenda Sulawesi Selatan (2014-2018) Pendapatan daerah merupakan keseluruhan dari pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah yang berguna dalam melakukan pembiayaan guna mencapai target dari pemerintah daerah dan pendapatan lainnya dari daerah yang real serta dalam pendanaan melewati pemerintah pusat yang biasa juga dikatakan dana transfer, akan dilakukan menggunakan prinsip demokratis, kesetaraan keadilan, peran masyarakat, dan pertanggungjawaban atas potensi yang dimiliki suatu daerah.

Sebagaimana UU No. 33 Tahun 2004 Tentang keseimbangan keuangan diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah pendapatan riil pendapatan tersebut didapat dari daerah memungut atas peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Berdasarkan pemahaman Mardiasmo (2012:12) bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai suatu iuran yang sifatnya wajib yang diperuntukan bagi suatu daerah yang terutang disebabkan orang pribadi suatu badan yang memiliki sifat pemaksaan serta diatur dalam UUD, Dengan tidak ada kata imbalan yang diperuntukan secara langsung di pergunakan untuk kebutuhan suatu daerah yang bertujuan untuk meningkatkan tarif ekonomi. Untuk itu pajak daerah sendiri dapat diartikan sebagai pajak yang telah ditentukan serta dipungut langsung oleh pemerintahan setempat berdasarkan peraturan daerah (perda), yang sepenuhnya wewenang terhadap pemungutan dilakukan langsung dilakukan oleh pemerintah daerah kemudian hasil dari pemungutannya dipakai dalam keperluan

rumah tangga suatu daerah dengan maksud meningkatkan pembangunan di daerah

### **2.2.1 Teori Pemungutan Pajak**

Beberapa teori menyebutkan mengenai memberi kewajiban terhadap Negara pada mengumpulkan pajak. Menurut Mardiasmo (2011: 3) teori tersebut membahas:

- a. Teori Asuransi, membahas mengenai kesejahteraan warga Negara . Maka itu rakyat diharuskan untuk membayar pajak untuk premi asuransi yang menjamin perlindungan rakyat.
- b. Teori Kepentingan, beban pajak yang diperuntukan kepada rakyat sesuai keperluan pihak yang berkaitan. Semakin banyak keperluan tersebut sehingga semakin besar pembayaran dilakukan.
- c. Teori Daya Pikul, pajak yang dibebankan semua rakyat secara merata yang dimaksud pembayaran pajak sesuai kemampuan masyarakat.
- d. Teori Bakti, pemungutan pajak tersebut didasarkan terhadap keadilan keterkaitan masyarakat yang bernegara untuk itu warga Negara yang berbakti serta sadar mengenai tentang kewajiban pembayaran pajak.

### **2.2.2 Fungsi Pajak Daerah**

Menurut Rahayu (2010: 27) terdapat Fungsi pajak ada 2 (dua) yaitu:

- a. Fungsi *Budgetair* adalah pokok pendapatan yang di terima oleh negara. untuk itu penggunaan pajak merupakan suatu alat ukur dalam menerima dana dalam jumlah banyak terhadap pendapatan kas negara berdasarkan standar berlaku serta penggunaan dalam pembiayaan atas pengeluaran negara. Tindakan ini diambil melalui perpanjangan dan peningkatan pemasukan dari pemasukan pajak melalui

disempurnakannya peraturan tersebut , Ada berbagai macam indikasi yang memiliki berpengaruh penting terhadap pertumbuhan dan pengoptimalisasi penerimaan dana untuk kas negara melalui retribusi pajak kepada warga masyarakat di antara lain:

- a. Adanya Kejelasan, suatu kepastian, serta kesederhanaan dari peraturan perpajakan.
  - b. Kebijakan pemerintahan untuk melaksanakan UU terkait perpajakan.
  - c. Sistem administrasi perpajakan jelas dan sesuai.
  - d. melayani
  - e. Sadar serta paham dari Warga Negara.
  - f. Keterampilan petugas pajak.
- b. Fungsi *Reguler* disebut juga sebagai fungsi dalam mengatur atau sebagai alat dalam aktivitas ekonomi. Pajak tersebut fungsinya dapat dijadikan sebagai alat dalam mengontrol dan menjalankan peraturan pemerintah di bidang sosial ekonomi, selain itu hal tersebut memberikan manfaat di bidang eksternal. Untuk kegunaan alat pengatur, adalah menyusun pendapatan daerah yang bermanfaat bagi pertumbuhan kualitas ekonomi yang lebih pesat dan melaksanakan penyaluran pendapatan terhadap ekonomi.

### 2.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Rizal and Hidayah (2018: 84-91) sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia memiliki tiga sistem antara lain:

- a. *Official Assessment System* merupakan wewenang kepada pemerintah terhadap pemungutan pajak dalam hal itu untuk menentukan pajak yang terutang bagi pihak wajib pajak. kriterianya sebagai berikut:
  - a) Hal dalam menentukan besar kecilnya pajak terutang terhadap fiskus.
  - b) Wajib pajak harus memiliki sifat aktif atau kurang aktif.
  - c) Surat ketetapan pajak timbul dari utang pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assessment System* merupakan suatu sistem dalam pemungutan pajak yang memberikan hak pada wajib pajak dalam menentukan besarnya pajak terutang kriterianya sebagai berikut:
  - 1) Hak dalam menentukan pajak terutang terhadap wajib pajak terutang ada terhadap wajib pajak sendiri.
  - 2) Wajib pajak aktif, merupakan perhitungan warga, penyetoran serta melaporkan sendiri mengenai pajak terutangnya.
  - 3) *Fiskus* disini dapat diartikan serta gunakan untuk menghitung besaran pajak terutang tetapi disini memiliki sifat mengamati dan memeriksa terkait dengan penjumlahan yang diisi oleh wajib pajak.
- c. *With Holding System* merupakan memungut pajak dengan memberikan hak terhadap pihak orang lain untuk mengetahui besaran dari pajak terutang dari wajib pajak hak di sini dapat diartikan sebagai besaran pajak terutang yang ada pada pihak ketiga.

## 2.2.4 Jenis Pajak

UUD No 28 Tahun 2009 pasal 2 yang membahas mengenai macam-macam pajak daerah yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

Tabel 2.2.4  
Macam-macam pajak daerah

NO	Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota,
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Pajak Hotel
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Pajak Restoran
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	Pajak Hiburan.
4	Pajak Air Permukaan	Pajak Reklame
5	Pajak Rokok	Pajak Penerangan Jalan
		Pajak pengambilan bahan galian golongan C
		Pajak parkir.
		Pajak sarang burung walet.

Sumber data: diolah tahun, 2021

## 2.2 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Piterdono (2016: 1) Kendaraan bermotor ialah segala jenis kendaraan yang memiliki roda atau pun lebih, beserta gandengan yang dipakai di berbagai jalan raya serta bergerak di peralatan teknik, dimana motor dan peralatan lain berguna dalam pengubahan suatu sumber daya energi tertentu menjadi energi, diantaranya peralatan berat, besar yang dapat bergerak didalamnya termasuk dalam pengertian kendaraan.

Menurut peraturan UUD No. 28 tahun 2009 adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dilihat dari pemilik serta penguasaan kendaraannya. Sebagaimana pasal 4 UU No. 28 Tahun 2009 adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadikan suatu pajak kendaraan bermotor diartikan sebagai bentuk pemilik yang terkait dengan penguasaan kendaraan bermotor yang dicatat di suatu daerah. Sedangkan

pelaku dari pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan pribadi dan milik kelompok usaha. Wajib PKB dapat diartikan sebagai pemilik pihak pribadi dan badan dari suatu instansi yang memiliki kendaraan roda dua semuanya itu memiliki tanggung jawab dalam pembayaran PKB yaitu:

- a. Pihak pribadi merupakan pihak terkait ahli waris yang memiliki kuasa
- b. badan instansi berupa pengurus memiliki kuasa.
- c. instansi pemerintah terdiri dari pejabat dan memiliki kuasa terhadap penggunaan anggaran.

Tidak semua perihal pemilikan dan pemahaman kendaraan bermotor terkena tarif pajak, karena terdapat beberapa pengecualian antara lain:

- a. Kereta Api
- b. Kendaraan Bermotor diperuntukan sebagai kebutuhan ketahanan dan keamanan Negara.
- c. Kendaraan Bermotor dimana kepemilikan serta penguasaan oleh kedutaan, konsulat, dan organisasi internasional menggunakan asas timbal balik yang mendapatkan sarana membebaskan pajak dari Pemerintahan.
- d. Kendaraan beroda dua yang dipunyai dan dimiliki pabrikan dan importer yang digunakan untuk memamerkan dan untuk di perjualkan.
- e. Kendaraan beroda dua yang dimiliki Negara adalah barang bukti yang disegel dan disita.

### **2.3.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar hukum PKB yaitu:

- 1) UUD No. 34 tahun 2000 yaitu terdiri atas perombakan atas UUD No. 18 tahun 1997 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 2) Aturan Pemerintahan Nomor 65 tahun 2001 mengenai Pajak Daerah.
- 3) Peraturan daerah Provinsi diatur pada PKB di dalam aturan Daerah dapat disatukan peraturanya tetapi bias pembuatan secara berbeda seperti aturan daerah mengenai PKB.
- 4) Peraturan Menteri terhadap Negeri No. 2 tahun 2006 membahas mengenai perhitungan awal terhadap pengenaan pajak kendaraan roda dua (motor) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006.
- 5) Peraturan Gubernur yang membahas mengenai PKB sebagai peraturan yang membahas tentang melaksanakan aturan Daerah pada suatu Provinsi.

### **2.3.2 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor**

Dasar dari tarif PKB merupakan sekumpulan penjumlahan total dari unsur yang terpenting seperti harga jual dari kendaraan bermotor selain itu dilihat dari bobotnya yang menggambarkan secara nyata mengenai tingkatan hasil dari jalan dan terjadi pencemaran. Terkhusus bagi kendaraan roda dua berupa motor yang dipergunakan kecuali diluar dari jalan besar, berupa alat berat serta alat yang ada di air, atas dasar pemungutan pajak bermotor dilihat dari nilai jualnya.

Harga jual tersebut didapat dari harga pasaran umum atas kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan harga pasaran yaitu nilai rata-rata yang didapat dari sumber data yang jelas. Harga jual kendaraan bermotor dapat dilihat berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Dilihat dari harga pasarnya serta satuan tenaga yang sejenis
- b. Pemakaian kendaraan motor yang diperuntukan sebagai merek sama serata dilihat dari tahun pembuatannya

- c. Harga kendaraan bermotor terhadap pemuatan kendaraan bermotor yang sejenis
- d. Harga kendaraan bermotor yang dapat dilihat sesuai file Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tarif harga pada jenis pajak dapat dilihat berdasarkan UU No..28. Tahun 2009 yang membahas mengenai hukum dalam pemungutan dalam suatu pajak diantaranya ialah:

- a. Tarif PKB orang pribadi ditentukan dengan empat indicator :

1	1,5%	untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi
2	1,0%	bagi kendaraan roda dua seperti angkutan umum (ojek)
3	0,5%	bagi kendaraan plat merah yang diperuntukan untuk kebutuhan sosial ,keagamaan,dan pemerintahan serta TNI/POLRI
5	0,2%	bagi kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

- b. Pemilik kedua atau roda dua serta roda empat ataupun lebih memperoleh tarif pengenaan secara progresif berdasarkan nama ,alamat,jenis kendaraan yang sama tarifnya dpt dikenakan sebagai berikut:
  - 1) Kepemilikan kedua sebesar 2%
  - 2) Kepemilikan ketiga sebesar 2,5%
  - 3) Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3%

Secara garis besar, menghitung PKB dapat dilihat serta menggunakan rumus sebagai berikut ;

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak}$$

$$\text{Tarif pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})$$

*Sumber:*

a. Tempat dan kewenangan pemungutan

PKB diperoleh dari kendaraan beroda dua yang mendaftarkan dan sudah dipatenkan oleh Gubernur, dalam memungut secara serentak dengan menerbitkan STNK dari motor tersebut. Pemungutan PKB dilaksanakan secara serentak dengan menerbitkan terkait surat tanda nomor kendaraan bermotor. Jika terjadi peralihan kendaraan bermotor di suatu daerah, dari satu ke daerah lain, maka hak wajib pajak tersebut diwajibkan untuk menyisipkan bukti terkait dalam pelunasan PKB.

b. Masa pajak

Masa pajak dari pengenaan PKB selama 12 bulan maka hal tersebut dapat dihitung mulai dari dilakukannya pendaftaran terkait kendaraan motor tersebut. Terkait kewajiban PKB karena suatu hal maka menyebabkan pajak terutang didasarkan dari total bulan yang berjalan sehingga masa pemungutan pajak PKB tidak sampai selama 12 bulan. Dengan itu maka pajak kendaraan bermotor tidak sampai selama 12 bulan dapat dilakukan restitusi. Kendaraan Bermotor telah didaftarkan pada suatu daerah dilihat dari mutasinya.

## **2.4 kontribusi**

Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Kontribusi memiliki makna

sebagai keikutsertaan dan maupun diartikan sebagai sumbangan. Yang dapat diartikan kontribusi masuk dalam jenis materi hingga dikategorikan dalam suatu tindakan misalnya yang bersifat materi orang pribadi menyerahkan suatu pinjaman kepada orang lain demi kepentingan bersama. Sedangkan dari segi tindakan tingka laku yang ditunjukkan oleh orang pribadi yang bersifat positif hingga negative kepada orang lain Anne (2012: 77).

Kontribusi pajak berkaitan langsung terhadap pembangunan serta kerja sama terhadap kehidupan dalam bernegara pembangunan tersebut dapat dilihat dari segi infrastruktur hingga SDM yang meningkat sedangkan kontribusi dalam bentuk pajak memiliki makna dalam mengatasi permasalahan social hingga tingkat kualitas hidup pada suatu Negara. Kontribusi pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah yang dibayar oleh masyarakat itu bertujuan untuk kemakuran untuk rakyat dilihat dari proses pemungutan pajak yang baik..

Menurut Handoko (2013) mengungkapkan bahwa besarnya kontribusi pajak Kendaraan Bermotor pada pendapatan asli daerah dapat menggunakan rasio kontribusi, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

*Sumber data: jurnal Handoko (2013)*

## 2.5 Potensi

Potensi menurut Endah (2020:135) dapat diartikan sebagai suatu kesanggupan yang kemungkinannya dikembangkan sebagai kekuatan dan memiliki daya yang dapat dikembangkan dengan lebih baik. Potensi itu sendiri juga tidak hanya diperuntukan untuk manusia dimiliki oleh suatu intitas baik itu daerah, wisata, dan lainnya.

Potensi pajak merupakan dasar dari penenaan besaran dari pajak daerah yang sifatnya dapat dipungut, dengan tujuan untuk dapat diketahui dari segi penepatan jumlah dari penerimaan pajak dalam periode berikutnya. Hal itu didapat dari hasil temuan yang dilakukan dilapangan yang memiliki kaitan langsung keseluruhan dari objek pajak kemudian dari situ dapat diperkalikan dengan tarif pajak penenaan pajak. (Mardiasmos).

## 2.7 Pertumbuhan

Dalam KBBI sendiri Pertumbuhan memiliki arti timbul (hidup) dan bertambah besar atau sempurna. Sehingga pertumbuhan yaitu perubahan secara kuantitatif pada fisik karena beberapa faktor (internal dan eksternal)

Pertumbuhan pendapatan dari PKB adalah suatu peristiwa yang perlu penting diketahui dikarenakan informasi tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah setiap tahunnya. Cara kerja analisis pertumbuhan adalah dengan membandingkan tren pertumbuhan pendapatan tahun lalu dengan tahun sekarang apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Dari informasi tersebut pembuat keputusan dapat mengevaluasi keputusan

keputusan yang diambil agar keputusan yang diambil saat ini dapat menciptakan tren peningkatan pendapatan setiap tahunnya.

Pertumbuhan positif dimaksudkan sebagai suatu kemampuan kerja keuangan Pendapatan yang cenderung meningkat, sedangkan pertumbuhan secara negatif dikatakan sebagai Kinerja Keuangan Pendapatan yang menunjukkan pengurangan (Mahmudi, 2016). Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa jika tingkat penerimaan cenderung meningkat maka dapat dikatakan pertumbuhan tersebut dikatakan positif. Sebaliknya jika tingkat penerimaan cenderung menurun setiap tahunnya maka pertumbuhan tersebut dikatakan negatif.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki manfaat yang dapat dijadikan perbandingan dan contoh terkait dengan pemberian suatu gambaran terhadap penelitian terdahulu mengenai tingkat pertumbuhan perekonomian. Hal itulah yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian yang perlu memiliki hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan menjadi patokan dalam membandingkan penelitian, olehnya itu terdapat beberapa penjelasan mengenai penelitian terdahulu terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**Tabel 2.6 Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	Widi Winarso (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kantor Cp Dispenda Provinsi Wilayah Kabupaten Sukabumi)	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor memiliki Pengaruh cukup besar yaitu sebanyak 87,1% pendapatan Daerah
2	Margaretha	Pengaruh Penerimaan	Dalam penelitian tersebut

	Anggraini, Anton Arisman (2014)	Pajak kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan.	menunjukkan suatu variabel PKB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan riil daerah
3	Ruslinda Agustina dan Rina Arliani (2003-2012)	Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003-2012	Secara simultan atau uji F PKB dan BBNKB berpengaruh terhadap PAD provinsi Kalimantan Selatan periode 2003-2012.

Sumber: Data Diolah, (2021)

## 2.9 Kerangka pemikiran

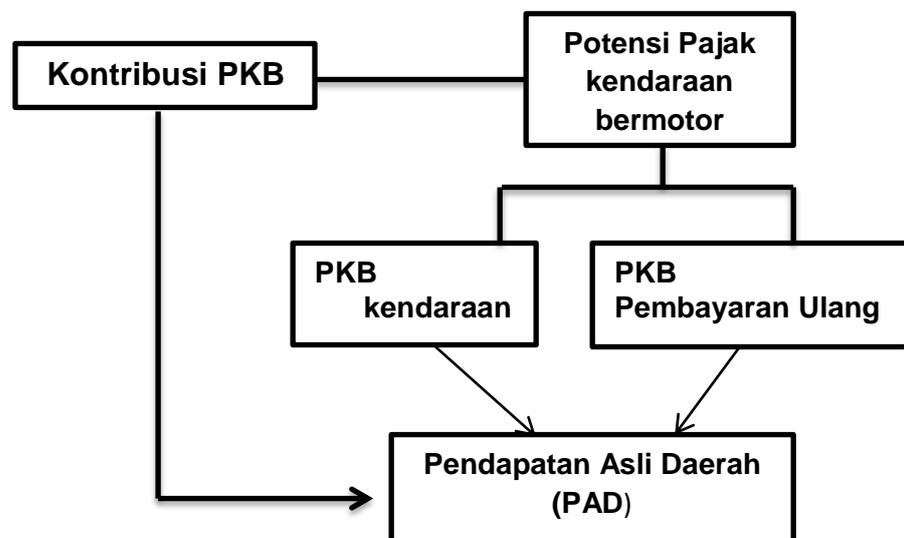
Kendaraan bermotor merupakan kendaraan jenis roda dua yang diperuntukan untuk di gunakan di jalan darat. Selain itu dapat diketahui bahwa PKB yaitu pajak yang diperuntukan terhadap kendaraan roda dua atau lebih. Cara Perhitungannya berpedoman pada PKB sebelumnya ( $2/3 \times \text{PKB}$ ). Pajak tersebut tidak akan berubah dari tahun sebelumnya apabila terjadi perubahan maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa kendaraan tersebut mengalami penyusutan atau usia pemakainya telah lama.

Meskipun hal tersebut tentunya membuat situasi perekonomian berada dalam ambang batas yang membuat perekonomian mengalami krisis. Dapat diketahui bahwa setiap tahun Perkembangan kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang signifikan seperti halnya yang terjadi di provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu berpengaruh dalam peningkatan PAD yang asalnya terletak pada sektor pajak kendaraan.

Fenomena tersebut pendorong untuk penulis pengetahuan secara jelas mengenai PKB untuk komponen dari pajak daerah Provinsi. Merupakan fokus

dari penelitian, Penulis menganalisis dan mengamati terkait dengan Potensi PKB kontribusinya terhadap PAD di Prov Sulsel.

**Gambar 2.7 Kerangka pikir penelitian**



*Sumber: Data Diolah tahun 2021*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan analisis dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Dimana Studi ini menggambarkan tentang riwayat yang mengarah kepada aspek yang jelas dan fenomena yang dapat dilihat dari sudut pandang individu, kelompok atau sebagainya dengan menggunakan angka. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif yang mencerminkan tentang suatu peningkatan dan Potensi yang dihasilkan dari PKB terhadap PAD serta potensi dan realisasi PKB periode 2016-2019.

#### **3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kantor Bapenda Prov. Sulsel Yang beralamat di Jl.A.Pettarani No.1 Makassar, yang berlangsung pada bulan Juni hingga selesai.

#### **3.3 Sumber Data**

Jenis data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer ialah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).
2. Data Sekunder yaitu data penelitian yang didapat melalui perantara (diperoleh dan serta dicatat oleh orang lain). Ada pula data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kendaraan bermotor 4 tahun (2016-2019).

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan suatu informasi yang berhubungan dengan data yang dikembangkan pada penelitian ini untuk itu diperlukan ialah:

- a. Penelitian lapangan (*field research*), dalam melakukan penelitian penulis mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari Dispenda Sulsel dengan melaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - 1) Wawancara (*interview*), yaitu tanya jawab yang dilaksanakan penulis secara langsung kepada pihak informan dengan tujuan untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
  - 2) Dokumentasi (*documentation*), ialah suatu upaya dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan berpatokan dari bukti yang ril.

### 3.5 Analisis Data

Dalam penggunaan Analisis data ini penulis melakukan penelitian dengan kuantitatif deskriptif di dalamnya membahas mengenai sistem pemikiran dalam metode peninjauannya yang mendeskripsikan dan menyajikan suatu kondisi yang saat penelitian dilakukan selain itu tujuan dari penelitian yang ini menunjukkan berapa besar Kontribusi dan potensi PKB, yang menandai pokok utama dalam sumber PAD.

- a. Untuk mengetahui perilaku dari kontribusi PKB terhadap PAD Prov Sulsel dilihat pada periode tahun 2016-2019, dengan menggunakan rumus :

$$Y = \frac{PKB}{PAD} \times 100 \%$$

Sumber data: jurnal KHAERIL ANWAR

Dimana :

Y diperoleh dari hasil dari kontribusi PKB dan dilihat dari tahun analisisnya. Olehnya itu dalam melihat perilaku dari pemungutan PKB, didapat dari hasil analisis persentase kontribusi PKB yang akan di dipresentasikan dari tahun analisisnya yaitu dari tahun 2016 hingga 2019. Sama halnya dengan jumlah kendaraan bermotor akan di grafikkan dari tahun periode 2016 hingga 2019.

- b. Potensi yang dimiliki PKB dapat diperoleh dari pengaliaman antara pajak terhutang terhadap jumlah kendaraan yang sifatnya sejenis. Untuk itu perhitungan potensi PKB dapat dilihat dengan menggunakan rumus:

Potensi Pajak = Pajak Terutang x Jumlah Kendaraan masing-masing Jenis Kendaraan ,Dimana JK menunjukkan jumlah kendaraan dan t menunjukkan tahun yang diprediksi.

$$JK(t) = JK(t-1) + \frac{JK(t-1) - JK(t-2)}{JK(t-1)} \times JK(t-1)$$

Sumber data: jurnal KHAERIL ANWAR J

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Instansi**

Dipenda Prov Sulsel masih jarang baik itu dari itu para pegawai dari lingkungan yang sama masih kurang mengetahuinya, yang menjadi tanda tanya besar bahwa instansi tersebut kapan mengubah namanya menjadi Bapenda Prov Sulsel sejak 1 Januari 2017 ini memulai kiprahnya.

Dengan perkembangan zaman PAD Sulsel mengalami suatu peningkatan yang melampaui target yang diperkirakan pengaruhnya diakibatkan oleh tingginya etos kerja dari SDM, Serta memiliki motivasi dari pihak pemimpin dan tentunya inofasi terhadap pelayanan yang terus berkembang selain itu dipengaruhi dari regulasi pendapatan contohnya seperti diberlakukannya Peraturan Gubernur tentang Kenaikan Tarif BBN (Bea Balik Nama) dari besaran 10 % menjadi 12,5 %.

Instansi ini dianggap sebagai primadona sumber pembiayaan bangunan yang terletak pada Prov Sulsel hal tersebut adalah bagian yang masuk dalam biro Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Sulsel bernama Bagian Penghasilan Daerah. Menjangkau daerah kerjanya yang cukup luas untuk PAD yang terdiri dari, pungutan yang asalnya dari pendapatan daerah lain maupun yang berasal dari penghasilan Negara diberikan kepada pihak pengelola di daerah tersebut.

Dasar hukum pemisahan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor : 130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 yang membahas mengenai Dispenda Tingkat I Sulsel, sejak saat itu pendapatan daerah yang berada di biro keuangan memiliki urusan yang tersendiri

tehadap dinas otonomi yang telah yang ditetapkan sebagai nama Dinas Pendapatan Daerah Prov Sulsel.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Sebaran Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan

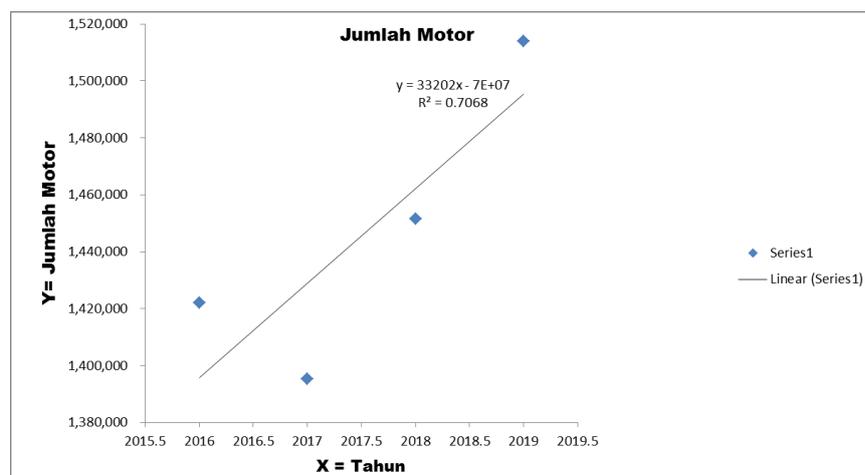
Jumlah kendaraan bermotor selama periode 2016 sampai 2019 di provinsi Sulawesi selatan meningkat cukup tajam terutama kendaraan beroda dua (sepeda motor) seperti pada gambar 2 berikut :

**Tabel 1.** Jumlah Sepeda motor

Tahun	Jumlah KB
2016	1,422,075
2017	1,395,305
2018	1,451,515
2019	1,514,011

**Gambar 2.**

Jumlah kendaraan bermotor di Prov. Sulsel periode 2016-2019.



Sumber data: BAPENDA diolah tahun,2021

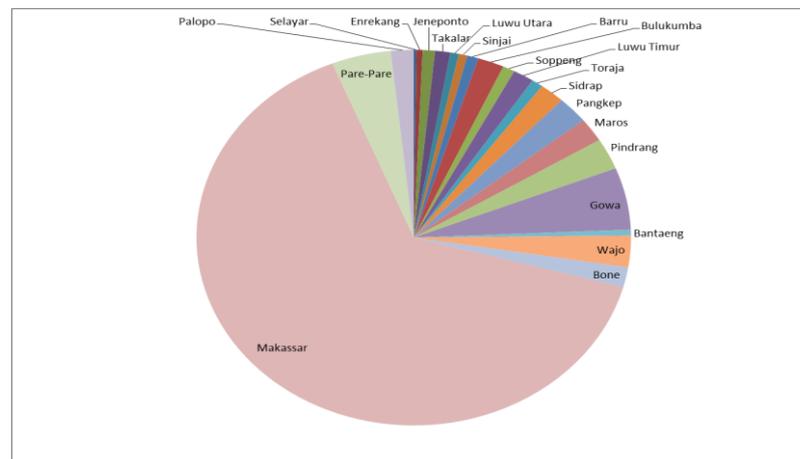
Dari gambar di atas kita bias melihat bagaimana peningkatan sepeda motor yang dilihat pada tahunnya beserta melihat dari segi pola linear dengan persamaan ialah:

Sepeda Motor :  $Y = 33202x - 7E+07$  = Dengan nilai  $R^2 = 0.7068$ , = Dimana jumlah sepeda motor ; X adalah tahun evaluasi. Sedangkan nilai  $R^2$  adalah tingkat kepercayaan seberapa besar model yang diperoleh dapat mewakili data atau bisa juga  $R^2$  = koefisien determinasi yang mempunyai nilai antara nol serta satu dapat diartikan sebagai ukuran kendaraan dengan garis prediksi linear dengan hasil perolehan data obserfasi yang di dalamnya terdiri dari jumlah sepeda motor dengan nilai  $7E+07$  hal tersebut dijadikan sebagai hasil pembulatan dari 65,538.905.

Perlu dipahami nilai rata-rata dari laju pertumbuhan sepeda motor, di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2016-2019 ialah berkisar 33,202 unit pertahun. Sebaran terhadap kendaraan bermotor dilihat pada masing-masing kabupaten yang dapat dilihat pada gambar 3 berikut

**Gambar 3.**

sebaran kendaraan bermotor yang ada pada setiap kabupaten/kota



Sumber data: BAPENDA diolah tahun,2021

Pada gambar tersebut memperlihatkan jumlah dari kendaraan bermotor paling besar jumlahnya terdapat pada kota Makassar, kemudian Dua wilayah selanjutnya mempunyai jumlah kendaraan yang terbanyak ialah Makassar dan Gowa. Dua wilayah berikutnya yang memiliki jumlah kendaraan sedikit ialah kabupaten bantaeng hingga selayar dari kedua kabupaten tersebut masing-masing tergolong dalam jumlah yang sedikit yang memiliki kendaraan yang ada di Prov Sulsel.

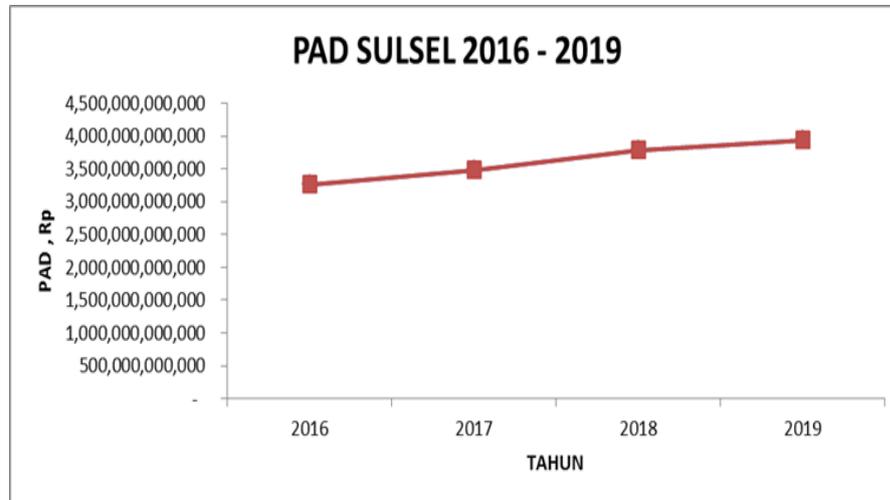
#### **4.2.2 Kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**

Menurut (Handoko 2013) Analisis Kontribusi Pajak Daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah

Data yang tersedia pada saat pelaksanaan penelitian baru sampai pada data tahun 2019. Oleh karena itu, periode analisisnya belum memasukan data tahun 2020. Untuk itu PAD Prov Sulsel selama periode 2016-2019 dapat dijelaskan pada Gambar berikut:

**Gambar 3.**

PAD Provinsi Sulawesi Selatan 2016-2019



Sumber data: BAPENDA diolah tahun, 2021

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan tersebut maka dapat mencerminkan bahwa PAD Prov Sulsel mengalami peningkatan yang cukup baik selama periode 2016-2019. Nilai PAD tahun 2019 sekitar 1.2 kali nilai PAD 2016. Hal tersebut cukup mencerminkan adanya pertumbuhan Ekonomi yang positif di Provinsi Sulawesi Selatan. dalam keempat periode tahun tersebut menjelaskan Realisasi PKB di Prov Sulsel dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

**Tabel 2.**

Realisasi PKB Prov Sulsel selama periode 2016-2019

TAHUN	PKB
2016	1,026,994,107,478
2017	1,103,139,264,509
2018	1,242,314,483,837
2019	1,394,198,331,701

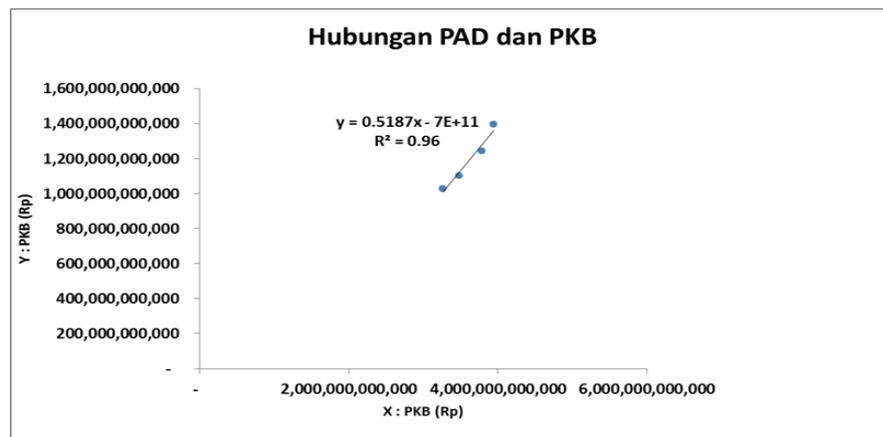
Sumber: (Laporan keuangan pendapatan Asli Daerah 2016-2019. Bapenda sulsel)

Pada Tabel tersebut dapat menunjukkan Realisasi PKB selama periode 2016-2019 yang mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan pola yang

sama terhadap perkembangan nilai PAD pada gambar 3 sebelumnya sesuai dengan situasi tersebut, maka nilai PAD diregresikan terhadap nilai PKB dan hasilnya ditunjukkan pada Gambar 4

**Gambar 4.**

Data Hubungan antara PAD dan PKB Prov. Sulsel periode 2016-2019.

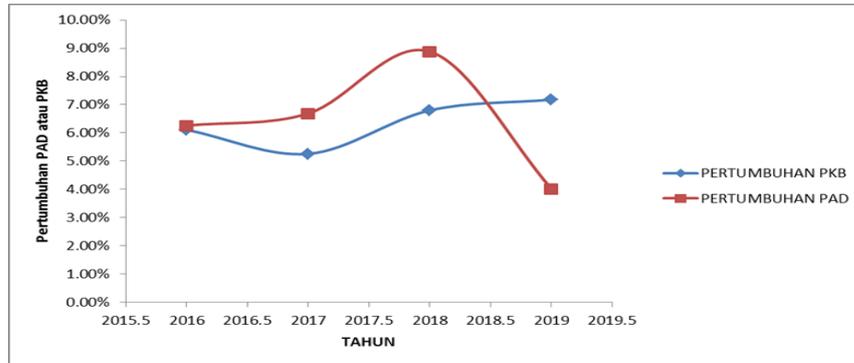


Sumber data: BAPENDA diolah tahun,2021

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa kenaikan nilai PAD mempunyai hubungan linear yang cukup kuat dengan kenaikan nilai PKB, nilai  $R^2$  sebesar 0.96. = adanya korelasi atau hubungan antara PKB dan PAD diperkuat dengan tren pertumbuhan antara PAD dan PKB selama periode 2016-2019 sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Kedua grafik ( PAD dan PKB) memiliki pola dimana keduanya memiliki pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018.

Gambar 5.

Data Tren pertumbuhan PAD dan PKB Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2019.



Sumber data: BAPENDA diolah tahun,2021

Untuk melihat perilaku kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2016-2019, rumus berikut ini akan digunakan: Untuk menghitung besarnya Kontribusi pajak hiburan per-tahun diperlukan data

$$Y = \frac{\text{PKB}}{\text{PAD}} \times 100 \%$$

$$2016 = \frac{1,026,994,107,478}{3,262,142,476,262} \times 100\% = 31\%$$

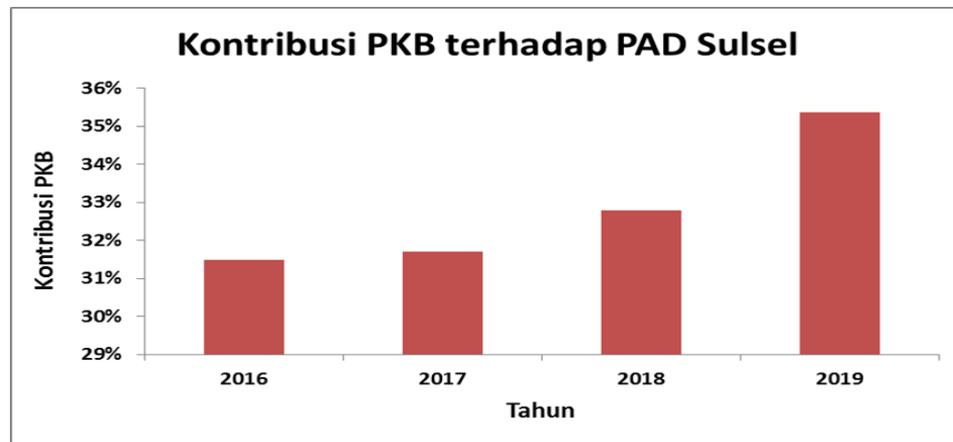
$$2017 = \frac{1,103,139,264,509}{3,480,280,113,526} \times 100\% = 32\%$$

$$2018 = \frac{1,242,314,483,837}{3,789,215,802,966} \times 100\% = 33\%$$

$$2019 = \frac{1,394,198,331,701}{3,941,376,289,114} \times 100\% = 35\%$$

**Gambar 6.**

kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2016-2019.



Sumber data: BAPENDA diolah tahun, 2021

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan gambar di atas kita melihat grafik menunjukkan bahwa kontribusi dari tahun ke tahun selama periode 2016-2019 mengalami kenaikan terlihat pada tahun 2016 kontribusinya adalah yang terkecil berkisar antara sekitar 31%, yang terbesar 35%. Tingkat kontribusinya dengan rata-rata sekitar 33%. Walaupun demikian, kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2019 dan terkecil tahun 2016.

#### **4.2.3 Potensi Peningkatan dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan**

Potensi menurut Endah (2020:135) ialah kemampuan memungkinkan dapat berkembang menjadi suatu kekuatan serta kesanggupan yang dapat dikembangkan melalui potensi pajak yang dapat dijadikan sebagai penentu besaran dari pajak daerah yang dipungut, untuk itu perlu adanya pengetahuan dalam menentukan besaran target dalam suatu periode selanjutnya.

Data jumlah kendaraan bermotor yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan diambil pada Laporan Sulawesi Selatan Dalam Tahun 2016. Data tahun 2020 tidak dapat diperoleh dikarenakan hal tersebut belum dapat diperoleh oleh peneliti dikarenakan belum dilakukan proses audit oleh pihak yang berkepentingan. Mengingat data yang ada pada Laporan Tahun 2016 hanya terkait periode tahun 2016-2019, maka data 2016 dan 2019 diprediksi dengan menggunakan pendekatan:

$$JK(t) = JK(t - 1) + \frac{JK(t - 1) - JK(t - 2)}{JK(t - 1)} \times JK(t - 1)$$

Sumber data: jurnal KHAERIL ANWAR J

Dimana JK menunjukkan jumlah kendaraan dan t menunjukkan tahun yang diprediksi. Hasil prediksi ini dapat dilihat pada tabel berikut bersama dengan data menurut laporan Sulawesi Selatan dalam angka Tahun 2016.

$$jk(2016) = 1,396,373 + \frac{1,396,373 - 1,256,069}{1,396,373} \times 1,396,373 = 1,536,677$$

$$jk(2017) = 1,422,075 + \frac{1,422,075 - 1,396,373}{1,422,075} \times 1,422,075 = 1,676,981$$

$$jk(2018) = 1,395,305 + \frac{1,395,305 - 1,422,075}{1,395,305} \times 1,395,305 = 1,817,285$$

$$jk(2019) = 1,451,515 + \frac{1,451,515 - 1,395,305}{1,451,515} \times 1,451,515 = 1,957,589$$

**Tabel 3.**

Jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan menurut BPS 2016-2019 dan hasil prediksi.

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Data Menurut Data BPS</b>	<b>*Prediksi</b>
2014	1,256,069	
2015	1,396,373	
2016	1,422,075	1,536,677
2017	1,395,305	1,676,981
2018	1,451,515	1,817,285
2019	1,514,011	1,957,589

Sumber: (Laporan keuangan pendapatan Asli Daerah 2016-2019. Bapenda sulsel)

. Data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ialah data jumlah kendaraan yang membayar PKB. Olehnya itu

data jumlah kendaraan terdaftar sama dengan data jumlah kendaraan yang membayar PKB . Untuk data jumlah kendaraan yang terdaftar serta telah melakukan pembayaran PKB untuk itu dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4.**

Jumlah kendaraan yang membayar pajak dan jumlah kendaraan menurut BPS, periode 2016-2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan Terdaftar dan Membayar Pajak</b>	<b>Jumlah Kendaraan Menurut BPS &amp; Prediksi</b>	<b>Selisih</b>
2016	1,422,075	1,536,677.00	114,602
2017	1,395,305	1,676,981.00	281,676
2018	1,451,515	1,817,285.00	365,770
2019	1,514,011	1,957,589.00	443,578

Sumber: (Laporan keuangan pendapatan Asli Daerah 2016-2019. Bapenda sulsel)

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa disetiap tahunnya terdapat sekitar 114 ribu sampai dengan 443 ribu unit kendaraan bermotor yang tidak membayar PKB. Sedangkan rata-rata nilai PKB persatu unit kendaraan dapat

dilihat pada tabel 5 dari tabel ini terlihat bahwa rata-rata nilai PKB berkisar Rp 700 ribu sampai dengan sekitar Rp 921. tingginya nilai rata-rata ini karena jumlah kendaraan sepeda motor jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 5.**

Rata-rata nilai PKB (Rp/unit kendaraan) Periode 2016-2019.

Tahun	Jumlah Kendaraan Membayar PKB	Realisasi PKB, Rp	Rata-rata PKB, Rp
2016	1,422,075	1,026,994,107,478	722,180
2017	1,395,305	1,103,139,264,509	790,608
2018	1,451,515	1,242,314,483,837	855,874
2019	1,514,011	1,394,198,331,701	920,864

Sumber: (Laporan keuangan pendapatan Asli Daerah 2016-2019. Bapenda sulsel)

Jika jumlah yang tidak membayar pajak yang terdapat pada tabel 4 dikalikan nilai PKB rata-rata per kendaraan, maka pajak terutang atau pajak yang tidak terpungut berkisar anatar sekitar Rp 83 miliar sampai dengan Rp 408 miliar ,seperti dapat dilihat pada Tabel 6 di bawah ini

**Tabel 6.**

Prediksi PKB tidak terbayar pertahunnya selama periode 2016-2019.

Tahun	Estimasi Jumlah Kendaraan yang Tidak Membayar Pajak	Rata-rata PKB , Rp/kendaraan	Total PKB Tidak Terbayar, Rp
2016	114,602	722,180	82,763,271,069
2017	281,676	790,608	222,695,292,764
2018	365,770	855,874	313,053,167,727
2019	443,578	920,864	408,475,042,506

Sumber: (Laporan keuangan pendapatan Asli Daerah 2016-2019. Bapenda sulsel)

berdasarkan seluruh informasi diatas dapat dihitung bahwa efektivitas penarikan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun

2016-2019 dari total potensi yang ada berada di kisaran antara 99 %-103%. Hal ini berarti terdapat potensi untuk meningkatkan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor sampai sekitar 105 %, tabel 7. Hasil perhitungan ini didasarkan pada asumsi bahwa data BPS Tahun 2016 tentang jumlah kendaraan bermotor dan prediksi yang dilakukan untuk tahun 2016 dan 2019 dianggap valid.

**Tabel 7.**

Tingkat efektifitas penarikan PKB periode 2016-2019.

Tahun	Potensi Pajak	Realisasi	Efektifitas, %
2016	1,006,097,880,000	1,026,994,107,478	102.08%
2017	1,106,098,000,000	1,103,139,264,509	99.73%
2018	1,195,598,000,000	1,242,314,483,837	103.91%
2019	1,345,247,950,000	1,394,198,331,701	103.64%

Sumber: (Laporan keuangan pendapatan Asli Daerah 2016-2019. Bapenda sulsel)

Untuk tahun meningkatkan efektifitas penarikan Pajak Kendaraan Bermotor, Badan Pendapatan Daerah Prov Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai upaya, seperti tahun 2016-2019 mulai melakukan uji coba pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online. Tapi hal ini masih dilakukan secara bertahap tidak hanya Badan Pendapatan Daerah juga membuat layanan unggulan samsat seperti:

- a. *Drive Thru* samsat
- b. Samsat Keliling
- c. Sms info pajak
- d. Sistem Informasi Pajak Daerah atau Sipada

Contohnya: Ketik Sulsel (spasi) DD, no.plat kendaraan, kode belakang plat kendaraan, di mana terdaftar kirim 9250. Biaya Rp1000

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari penelitian ini peneliti memperoleh beberapa kesimpulan seperti berikut ini:

Berdasarkan rumusan masalah dan analisis data yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu Jumlah kendaraan di Prov Sulsel mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata-rata laju pertumbuhan selama 2016-2019 adalah sekitar 33,202 unit kendaraan bermotor pertahun.

Kemudian dari hasil perhitungan analisis Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2016-2019 cukup tinggi yang berkisar antara 31% sampai 35% dengan rata-rata sekitar 33%.

Selama periode 2016-2019 terdapat sekitar 114 ribu sampai dengan 443 ribu unit kendaraan bermotor pertahun yang tidak membayar PKB. Sedangkan dari hasil perhitungan peningkatan Potensi PKB Provinsi Sulawesi Selatan berkisar antara Rp 83 Miliar Sampai Rp 408 Miliar pertahun selama periode 2016-2019.

Realisasi PKB setiap tahunnya selama periode 2016-2019 selalu dibawah nilai potensi PKB yang ada. Efektivitas penarikan PKB hanya sekitar 99 %-100 % sampai 105 % selama periode 2016-2019.

## 5.2 Saran

Peneliti menemukan beberapa strategi dan saran untuk menarik wajib pajak untuk membayar pajak untuk Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan agar bisa meningkatkan pendapan PKB Sebagai kontribusi terbesar dalam susunan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

- 1 Komunikasi, pemerintah Prov. Sulsel dalam hal ini Bapenda melakukan Sosialisai disegala bidang seperti mesia massa, media social , bahkan di tempat ibadah.agar wajib pajak tidak lupa membayar pajak dan meningat kewajibanya.
- 2 Kerjasama, sering bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan razia untuk mendapatkan wajib pajak yang belum atau tidak membayar pajak.
- 3 Sistem pelayanan, adanya *via online*, sehingga memudahkan para wajib pajak dan tidak perlu mengantri unutk membayar pajak.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Analisi dari hasil penelitian harus dapat dipertimbangkan mengenai Evaluasi terhadap hasil penelitian, di antaranya ialah Data yang dibutuhkan sangat terbatas dan juga adanya pemberlakuan WFA di kantor Bapenda dan juga adanya Pemberlakuan PPKM dari pemerintah , Lokasi penelitian hanya 1 (satu) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012, h. 77.
- Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan, *Target dan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014-2018*. Dan, Bermotor, B E A Balik, Stie Mdp, and J L Rajawali. 2014. "SUMATERA SELATAN." (x).
- E Piterdono HZ, *target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2012-2016*, (Bandar Lampung: Bapenda, 2017) h.
- Edward. 2013. "Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado." *EMBA Vol. No.3*.(ISSN 2303-1174.).
- Endah, Kiki. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(1): 135–43.
- Handoko. 2013. "Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak." *Jurnal Ilmiah* Vol.1 No.1.
- Herjanti, Secillia, and I Wayan Teg Teg. 2020. "Analisis Efektivitas Dan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bogor Periode 2013-2017." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8(1): 37–48.
- Kementerian Dalam Negeri. 1996. Pedoman Penilaian Dan Kinerja Keuangan No. 690.900.329. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.*
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 884 / III / TAHUN 2020 Tentang Pemberian Insentif Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020 Dalam Masa Tanggap Darurat Covid-19 Di Provinsi Sulawesi Selatan.*
- Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah 2016-2020. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar.*
- Maharani, Cristina Siwi. 2019. Dalam Jurnal yang diakses pada "Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2016." Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, *perpajakan*, (Yogyakarta: Andi offset, 2011), h.3
- Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,(Bandung: Fokus Media,2009),h.201
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Pasal 4*
- Ratnasari, Tibertius Nempung, and La Ode Suriadi. 2016. “*Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sulawesi Tenggara.*” *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan* 1(1): 82–95.
- Rizal, Yani, and Miftahul Hidayah. 2018. “*Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh.*” *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* 9(1): 84–91.
- Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu 2010)h.27
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasal
- Undang-undang Nomor 09 tahun 2015 “*tentang pemerintahan daerah*”
- Yani Rizal, “*Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik*”
- Yulies Tiena Masriani, *pengantar hukum Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika 2009) h.130
- Widi Winarso,“*Analisis Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah*”. (makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Inovasi dan Tren (SNIT) yang diselenggarakan oleh Akademi Manajemen Keuangan Bina Sarana Informatika ,Jakarta, 2015).

## DAFTAR LAMPIRAN

### 1) Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Bagaimana Sejarah singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan?
- b. Bagaimana Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi di Dinas Pendapatan Sulawesi Selatan terutama di bidang PAD?
- c. Apa saja sistem yang dibuat kantor pajak untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat ?
- d. Upaya apa saja Dalam Pengembangan meningkatkan potensi pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terutama di bidang PAD?

### 2) Tentang Kontribusi

- a. Apakah pajak kendaraan bermotor yang terealisasi tahun 2015 sampai 2019 sudah melampaui target pajak yang ditetapkan?
- b. Apakah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan sudah efektif ?
- c. Bagaimana cara penentuan biaya pemungutan pajak kendaraan bermotor ?
- d. Bagaimanakah peranan/kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Sulawesi Selatan khususnya tahun 2015 sampai dengan tahun 2019?
- e. Adakah upaya memudahkan pembayaran pajak oleh wajib pajak di Sulawesi Selatan ?

- f. Adakah penetapan sanksi pajak kepada wajib pajak yang tidak membayar kewajibannya? dan adakah kesulitan yang dihadapi dalam penegakan sanksi pajaknya!
- g. Apa saja upaya yang dilakukan untuk penagihan pajak daerah supaya mencapai target?

### **3) Tentang pajak dan Peningkatan Potensi**

- a. Bagaimana Peningkatan potensi pemungutan pajak kendaraan bermotor tahun 2015-2019 apakah mengalami peningkatan atau penurunan?
- b. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan apa saja hambatan yang dihadapi?
- c. Apa saja pengaruh peningkatan potensi pajak kendaraan motor bagi pendapatan asli daerah dan berapa persen pengaruhnya bagi pajak PAD?
- d. Apakah kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya ?
- e. Apakah terdapat pengaruh tingkat kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap PAD dengan kemudahan atau fasilitas pembayaran pajak daerah?

### Hasil wawancara

#### 1. Hasil Wawancara Peneliti di Badan Pendapatan Asli Daerah

Hari/tanggal :26 juli -13 Agustus 2021

Pukul :10:00 WIB

TEMPAT : BAPENDA SULAWESI SELATAN

1	Peneliti	Apakah pajak kendaraan bermotor yang terealisasi tahun 2015 sampai 2019 sudah melampaui target pajak yang ditetapkan?
	Narasumber	Yah,dari data yang kita sudah ambil dari tahun 2015-2016 sudah cukup melampaui target pajak yang ditetapkan dan
2	Peneliti	Apakah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan sudah efektif?
	Narasumber	Yah sudah efektif karena bisa dilihat laopran yang saya kasih ke kalian itu d hitung dan pasti hasilnya pasti akan efektif, selainitu dibuktikan sehingga kita tdk mungkin berkata efektif klu data nya tidak efektif.
3	Peneliti	Bagaimana peranan/kontribusi PKB terhadap pendapatan asli daerah di Sulawesi Selatan khususnya tahun 2015-2016?
	Narasumber	kontribusi PKB dan pajak daerah lainnya memiliki peranan penting dalam menopang program pembangunan daerah,oleh karena itu, pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran Negara dalam membiayai pengeluaran,

4	Peneliti	Apakah kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi setiap tahunnya?
	Narasumber	Yahh mengalami fluktuasi setiap tahunnya seperti data yang kita lihat ,kontribusi pajak dapat berubah-uba setiap tahun tergantung dari penerimaan pajak.

5	Peneliti	Apakah terdapat pengaruh tingkat kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap PAD dengan kemudahan atau fasilitas pembayaran pajak?
	Narasumber	Tentu ada pengaruh tingkat kontribusi setiap jenis pajak
6	Peneliti	Apa upaya yang dilakukan oleh Bapenda dalam meningkatkan pemungutan PKB dan apa saja hambatan yang dihadapi
	Narasumber	Dalam rangka meningkatkan pemungutan PKB ,adabanyak hambatan yang dihadai salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang malas membayar pajak.
7	Peneliti	Upaya apa saja yang dilakukan dalam pengembangan meningkatkan potensi pajak Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan terutama dibidang PAD?
	Narasumber	Upaya yang dilkaukan yah itu membuat layanan unggulan seperti Samsat link,e-samsat,dan samsat keliling.
8	Peneliti	Bagaimana peningkatan potensi PKB tahun 2015-2019 apakah mengalami peningkatan atau penurunan?
	Narasumber	Mengalami peningkatan cukup baik.

## A. Foto dokumentasi



B. Realisasi Pendapatan yang dikelola Badan Pndapatan Daerah Prov.Sulawesi Selatan Tahun 2018-2019

NO. PENDAPATAN	2016			2017			2018			2019		
	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
A. PAKAIAN	2.145.433.142.000,00	2.078.842.342.370,00	97,31	2.319.463.000,00	2.241.746.437,20	97,06	2.462.100.500,00	2.462.104.656,22	100,00	2.372.000.000,00	2.370.611.599,41	100,00
1. PDB	1.008.007.800.000,00	1.026.064.072.000,00	102,08	1.106.000.000,00	1.103.138.204.509	99,73	1.158.500.000,00	1.142.214.483,87	100,00	1.345.247.500,00	1.334.100.331,70	100,00
2. BONGK	991.412.000.000,00	992.000.222.043,00	100,00	997.912.000,00	942.823.807,093	95,44	997.912.000,00	901.224.670,479	91,23	990.777.500,00	1.020.174.480,703	102,85
3. PDBB	495.902.782.000,00	501.074.598.683,00	101,04	546.050.000,00	563.111.539,483	103,12	618.834.000,00	634.138.302,944	102,54	659.062.146,380	654.833.798,889	100,81
4. PP	72.022.500.000,00	74.813.180.695,00	103,87	79.453.000,00	83.252.081,008	104,74	98.953.853,000	99.273.770,342	100,32	92.219.000,000	83.614.102,811	101,51
5. PALM POKOK	580.000.000.000,00	464.701.158.500,00	80,10	600.000.000,000	547.419.648,597	91,24	560.000.000,000	565.223.421,238	100,91	630.902.000,000	548.040.919,837	86,86
B. RETRIBUSI	81.910.000,00	83.220.000,00	100,00	134.220.000	134.700,000	100,38	154.530,000	146.805,200	97,82	245.833,000	262.202,000	106,65
INSTR												
C. KESEKAM DESAH YANG DIPERKAWAL	106.739.884.493,00	106.739.884.493,00	100,00	127.063.838,887	127.002.594,833	100,00	109.400.422,819	108.940.315,339	99,51	111.638.421,287	111.251.193,177	99,73
D. PADJARAN YANG SIA	62.225.000.000,00	75.607.222.424,52	121,55	79.375.000,000	115.392.987,397	146,54	116.472.000,000	217.915.528,419	187,14	127.791.520,671	198.165.396,336	155,12
4. DESA PALM	38.225.000.000,00	51.558.880.228,00	135,10	44.375.000,000	47.172.484,824	106,31	51.972.000,000	61.655.361,708	118,82	78.642.289,771	71.301.504,608	90,67
1. DESA PDB	38.600.000.000,00	30.302.713.295,00	82,79	40.000.000,000	45.447.745,391	113,62	50.330.500,000	58.803.320,665	116,83	69.785.349,771	66.897.370,506	96,02
2. DESA BONGK	1.625.000.000,00	1.284.115.824,00	77,74	4.375.000,000	1.665.243,423	38,06	1.641.499,000	2.622.201,153	160,39	6.877.200,000	4.270.134,100	62,10
3. DESA PPP												
5. DESA RETRIBUSI												
1. TOTAL PDB (A+B+C+D)	2.145.502.704.493,00	2.078.142.076.512,20	97,42	2.359.000.000,000	2.280.208.113,291	97,07	2.707.214.022,819	2.707.215.002,966	100,00	2.692.541.227,489	2.641.070.289.114	98,10

(Pdb)  
2 \* + 1418,815,726,139.

## C Data kendaraan bermotor

**DATA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MELAKUKAN DAFTAR ULANG  
MENURUT TAHUN PAJAK DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO. TAHUN PAJAK	RODA 2					RODA 4					JUM
	UNIT	POKOK	DENDA	JUMLAH	UNIT	POKOK	DENDA	JUMLAH	UNIT		
1 2015	183,235	141.988.208,575	29.805.985,789	171.804.194,364	16,236	112.623.610,507	23.569.897,830	136.223.219,337	199,471		
2 2016	201,239	130.797.473,750	26.471.272,173	157.268.745,923	20,660	128.312.187,072	26.426.208,052	151.738.395,124	221,899		
3 2017	219,450	112.318.939,900	21.486.453,024	133.805.392,924	27,014	135.630.789,328	26.897.202,149	161.527.991,477	246,484		
4 2018	236,259	96.132.172,650	14.526.794,488	100.457.967,138	33,738	128.819.404,644	21.001.812,908	147.821.217,550	269,697		
5 2019	387,952	77.261.898,075	7.304.199,316	84.566.098,391	70,800	152.025.702,901	12.821.791,008	164.847.493,909	459,752		
<b>TOTAL</b>	<b>1.228.135</b>	<b>548.508.693,950</b>	<b>99.393,704,790</b>	<b>647.902.398,740</b>	<b>166.448</b>	<b>653.411.694,451</b>	<b>108.746.681,945</b>	<b>762.159.376,396</b>	<b>1.396.663</b>		

## D Rata-rata Pertumbuhan KB

RATA-RATA PERTUMBUHAN KB DARI 2011 KE 2015												
JENIS KB RATA-RATA /TUMB /THN	BARU				ULANGAN				JUMLAH			TOTAL
	HITAM	KUNING	MERAH	JUMLAH	HITAM	KUNING	MERAH	JUMLAH	HITAM	KUNING	MERAH	
SEDAN, JEEP, ST.WAGEN	12.11	(5.44)	23.08	11.78	11.97	(7.34)	7.37	9.19	11.75	(7.40)	8.59	9.30
BUS DAN MICROBUSS	9.30	18.88	33.91	9.76	9.30	(2.29)	8.21	1.01	9.00	(1.60)	10.19	1.64
TRUCK, PICK UP	10.75	149.48	52.16	13.82	7.15	31.63	10.97	8.03	7.45	36.56	14.91	8.57
KEND.KHUSUS/ALBER	(32.00)	(20.00)	(20.00)	(32.00)	311.09	(33.09)	90.77	152.31	243.23	(33.52)	86.36	130.82
JML KB RODA 4 KE ATAS	11.49	26.68	28.86	12.05	10.60	(3.19)	8.22	8.86	10.53	(2.23)	10.09	9.08
JUMLAH KB RODA 2 & 3	(3.40)	-	16.44	(3.22)	5.64	-	3.50	5.54	3.89	-	4.89	3.85
TOTAL	(1.89)	26.68	18.65	(1.59)	6.45	(3.19)	4.42	6.14	4.92	(2.23)	5.90	4.75

RATA-RATA PERTUMBUHAN KB DARI 2012 KE 2016												
JENIS KB RATA-RATA /TUMB /THN	BARU				ULANGAN				JUMLAH			TOTAL
	HITAM	KUNING	MERAH	JUMLAH	HITAM	KUNING	MERAH	JUMLAH	HITAM	KUNING	MERAH	
SEDAN, JEEP, ST.WAGEN	10.56	(6.19)	28.35	10.44	12.90	(8.72)	16.81	10.42	12.39	(8.76)	17.73	10.23
BUS DAN MICROBUSS	(4.62)	7.68	35.82	(0.34)	5.84	(2.53)	23.33	2.20	4.25	(2.69)	22.92	1.64
TRUCK, PICK UP	2.25	9.33	50.29	2.81	8.09	31.44	21.20	9.24	7.31	26.12	22.48	8.34
KEND.KHUSUS/ALBER	(48.37)	(20.00)	(5.00)	(47.25)	(31.46)	(33.09)	90.77	(31.14)	(33.09)	(33.52)	87.47	(32.62)
JML KB RODA 4 KE ATAS	7.96	1.97	31.08	7.92	11.52	(3.52)	18.01	10.06	10.92	(3.53)	18.99	9.67
JUMLAH KB RODA 2 & 3	(5.74)	-	17.54	(5.55)	4.76	-	9.09	4.82	2.84	-	9.91	2.93
TOTAL	(4.32)	1.97	19.89	(4.10)	5.90	(3.52)	11.01	5.79	4.13	(3.53)	11.82	4.11

RATA-RATA PERTUMBUHAN KB DARI 2013 KE 2017												
JENIS KB RATA-RATA /TUMB /THN	BARU				ULANGAN				JUMLAH			TOTAL
	HITAM	KUNING	MERAH	JUMLAH	HITAM	KUNING	MERAH	JUMLAH	HITAM	KUNING	MERAH	
SEDAN, JEEP, ST.WAGEN	5.11	(26.90)	21.00	4.77	13.12	(13.76)	15.54	10.48	11.96	(14.04)	15.80	9.70
BUS DAN MICROBUSS	(9.71)	9.17	48.84	(0.34)	11.84	(5.29)	20.56	2.57	8.66	(5.36)	21.16	1.77
TRUCK, PICK UP	(3.08)	(6.86)	28.00	(3.39)	7.94	23.95	20.05	8.82	6.61	16.47	19.69	7.27
KEND.KHUSUS/ALBER	(41.97)	(40.00)	(25.00)	(41.74)	(8.22)	(16.84)	59.97	(4.33)	(10.99)	(37.27)	45.72	(7.37)
JML KB RODA 4 KE ATAS	2.75	(13.29)	21.44	2.25	11.73	(7.47)	17.12	10.05	10.51	(7.92)	17.27	9.06
JUMLAH KB RODA 2 & 3	(4.87)	-	16.25	(4.70)	3.27	-	10.12	3.36	1.89	-	10.69	2.01
TOTAL	(3.96)	(13.29)	17.05	(3.84)	4.75	(7.33)	11.72	4.64	3.34	(7.79)	12.15	3.29

RATA-RATA PERTUMBUHAN KB DARI 2016 KE 2019												
JENIS KB RATA-RATA /TUMB /THN	BARU				ULANGAN				JUMLAH			TOTAL
	HITAM	KUNING	MERAH	JUMLAH	HITAM	KUNING	MERAH	JUMLAH	HITAM	KUNING	MERAH	
SEDAN, JEEP, ST.WAGEN	(8.58)	(30.70)	(12.15)	(8.91)	10.29	(25.33)	1.93	8.44	8.46	(25.54)	0.49	6.83
BUS DAN MICROBUSS	1.68	5.70	11.71	(4.65)	6.70	(10.89)	7.62	(2.34)	5.85	(11.91)	5.34	(3.17)
TRUCK, PICK UP	(0.74)	(17.05)	3.07	(1.43)	2.23	(1.90)	3.04	1.96	1.94	(2.99)	3.04	1.62
KEND.KHUSUS/ALBER	(10.27)	(20.00)	(30.00)	(14.48)	10.92	(20.00)	105.04	17.32	9.72	(40.00)	92.93	15.64
JML KB RODA 4 KE ATAS	0.25	(18.34)	0.10	(0.12)	3.53	(6.58)	2.84	2.94	3.20	(7.00)	2.49	2.64
JUMLAH KB RODA 2 & 3	0.56	(20.00)	(3.45)	0.51	0.43	-	3.32	0.49	0.45	-	2.60	0.49
TOTAL	0.51	(18.35)	(2.70)	0.41	1.07	(6.45)	3.19	1.02	1.00	(6.87)	2.57	0.94